

Peran Greenpeace dalam Revolusi Energi Filipina

The Role of Greenpeace in Philippine Energy Revolution

Abstrak

This paper aims to describe how a Non Government Organization can become an actor in decision making process, using Greenpeace Philippines as one of environment NGO. Greenpeace Philippines bring and introduce Energy Revolution to stop climate change and safe the environment. As a developing country, Philippines has grown fast and their energy depend on the fossil fuel, especially coal. The coal is the single threat for climate.

Greenpeace Philippines do campaign to educate people and push the government for fair and legally-binding energy law.

Keywords: NGO, Greenpeace, security environment, Philippines, energy revolution

Rizqi Arindiah Sri Kusuma Astuti
Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Poliik
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
arindiahrizqi@gmail.com

Pendahuluan

Perubahan iklim adalah bencana yang serius, Filipina telah merasakan dampak yang begitu dahsyat, dimana pada tahun 2013 Filipina dilanda badai terbesar

sepanjang sejarah, Topan Haiyan. Bencana yang membuat kerugian yang sangat besar, tidak hanya perekonomian, tetapi juga sosial dan lingkungan. Sektor energi dianggap bertanggungjawab atas dua pertiga dari penyebab terjadinya perubahan iklim, sebab emisi gas rumah kaca yang yang dihasilkan paling besar berasal dari pembangkit listrik tenaga batu bara (PLTU) dan batu bara merupakan

primadona yang menjadi sumber energi dalam menghasilkan listrik di Filipina. Dimana berdasarkan laporan dari Departemen Energi Filipina, penggunaan batu bara sangat dominan sebagai pembangkit daya, yaitu sebesar 38,76% di tahun 2012. (The True Cost of Coal Volume 2 2014)

Batu bara merupakan ancaman tunggal yang berbahaya bagi iklim dunia. Batu bara tidak hanya menghasilkan gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global, tetapi pembangunan satu unit pembangkit listrik tenaga batu bara (PLTU) telah membawa dampak negatif pada lingkungan sekitarnya. Menimbulkan kondisi yang tidak sehat karena proses pembakaran batu bara dapat berpotensi menyebabkan kematian, dimana emisi karbon merusak paru-paru secara perlahan, selain itu adanya ancaman pada lingkungan sekitar, limbahnya menyebabkan air menjadi terkontaminasi sehingga jumlah air bersih menjadi terbatas, serta terancamnya keamanan pangan yang disebabkan hilangnya hasil pertanian dan laut. (The True Cost of Coal Volume 1 2014) Sehingga diperlukannya perencanaan energi yang lebih efisien dan tidak mengancam kelestarian lingkungan. Salah satu upaya dunia dalam mengatasi perubahan iklim adalah membuat regulasi dan perjanjian yang mengatur negara-negara dunia untuk mengontrol bahkan mengurangi emisi gas rumah kaca.

Greenpeace adalah salah satu organisasi lingkungan global yang aktif dalam mengkampanyekan penyelamatan dan konservasi lingkungan dengan cara merubah perilaku dan kebiasaan manusia secara damai tanpa kekerasan. Greenpeace Asia Tenggara telah berdiri sejak 1 Maret 2000 dengan kantor pusat yang berada di Filipina, selain di Filipina Greenpeace juga memiliki dua kantor lainnya di Thailand dan Indonesia. Greenpeace memilih kawasan Asia Tenggara bukanlah tanpa alasan, Asia Tenggara adalah kawasan kunci untuk menentukan keamanan lingkungan global. Dalam aksinya Greenpeace Asia Tenggara fokus pada kawasan Indonesia dan Filipina.

Filipina merupakan salah satu dari 11 negara di kawasan Asia Tenggara yang agresif dalam pembangunan. Filipina adalah negara kepulauan yang terdiri

dari 7100 pulau dengan 3 pulau terbesar yaitu Luzon, Visayas, dan Mindanao. Luas seluruh daratn Filipina adalah 300.000 km².(Aida M.Jose dan Nathaniel A. Cuze, *Climate Change Impacts and Responses in The Philippines: Water Resources*) Sebagai negara yang memiliki pertumbuhan cepat di Asia Tenggara, Filipina sangat bergantung pada energi, dimana kebutuhan akan energi diperkirakan meningkat 4% setiap tahunnya. (Iris Gonzales, *Renewable Energy in the Philippines* : Asia Climate Jurnal. 13 Mei 2015)

Filipina merupakan *Climate Hotspot*, yaitu kawasan yang beresiko tinggi terhadap dampak perubahan iklim, tercatat dalam data *Global Climate Risk Index* di tahun 2012, Filipina menempati urutan kedua setelah Haiti sebagai kawasan yang terancam. (The True Cost of Coal Volume 2 2014) Dimana pada laporan tahun sebelumnya dalam *Global Climate Risk Index 2011* Filipina menempati tempat keempat, sebuah peningkatan yang negatif. Dalam laporan lain yaitu Filipina menempati nomer tiga dalam *United Nations World Risk Index*, nomer enam dalam *Maplecroft 2012 Climate Change Vulnerability Index*. Meskipun semua laporan menyampaikan ranking yang berbeda pada kondisi lingkungan Filipina, namun tetap menunjukkan bahwa Filipina menempati tempat sebagai kawasan yang paling rawan terhadap perubahan iklim yang terjadi. (The True Cost of Coal Volume 2 2014) Filipina merupakan kawasan yang sering dilanda topan, bahkan merupakan bagian dari siklus tahunan, namun adanya perubahan iklim yang ekstrim membuat frekuensi topan di Filipina menjadi tidak biasa, lebih berbahaya yang menyebabkan banjir yang ekstrim, erosi tanah, dan kerugian ekonomi yang besar. (The True Cost of Coal Volume 2 2014)

Greenpeace datang ke Filipina dengan memperkenalkan Revolusi Energi. Membawa dan menawarkan solusi untuk memaksimalkan peraturan akan energi terbarukan sebagai upaya penyelamatan lingkungan. Revolusi Energi merupakan skenario energi yang memperlihatkan bagaimana dunia bisa mengurangi emisi, tanpa tenaga nuklir, menghemat uang dan menjaga pembangunan ekonomi global, tanpa menyebabkan bencana besar akibat dari perubahan iklim. (Taskel 2013) Solusi praktis untuk memenuhi kebutuhan energi, Revolusi energi menawarkan

sebuah jalan berkelanjutan untuk keluar dari bahan bakar yang kotor dan berbahaya dengan bertransisi ke energi bersih dan efisien. (Greenpeace Filipina)

Tulisan ini akan mencoba menjelaskan bagaimana Organisasi non Pemerintah dapat terlibat dalam proses pembuatan kebijakan suatu negara dengan menggunakan Greenpeace Filipina sebagai studi kasus mengenai perannya dalam Revolusi Energi di Filipina.

Peran Non Government Organization: Kerangka Teori

Teori peran pertama kali menarik perhatian dalam literatur kebijakan luar negeri setelah publikasi kajian K.J.Holsti (1970) mengenai gambaran peran nasional. Teori peran dalam 40 tahun terakhir berkembang dalam ilmu sosiologi, psikologi sosial dan juga anthropology. Gambaran akan peran mengacu pada persepsi seseorang atas posisinya yang berhadapan dengan orang lain dan persepsi atas ekspektasi peran dari orang lain yang ditandai melalui bahasa dan tingkah laku. Peran adalah posisi sosial yang dibentuk atau didasari oleh ego dan perubahan ekspektasi yang berhubungan dengan tujuan dari seorang aktor dalam suatu kelompok organisasi.

Definisi bahasa dari peran adalah kiasan yang dibawa dari panggung drama atau sandiwara. Pengertian peran menurut Abu Ahmadi adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Sedangkan, menurut Soerjono Soekanto peran merupakan aspek dinamis kedudukan atau status apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari dua pendapat ahli dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap dan perbuatan yang diharapkan oleh seseorang karena memiliki jabatan atau kedudukan tertentu.

NGO sebagai aktor baru memiliki peran dalam dunia politik global terutama dalam hubungan internasional, sebagaimana yang Buotros-Ghali (1995) jelaskan:

“Non-Governmental organizations are a basic element in the representation of the modern world. And their participation in international organizations is a way a guarantee of the latter’s political legitimacy. From the stand point of global democratization, we need the participation of international public opinion and the mobilizing powers of public opinion and the mobilizing powers of non-governmental organizations.”
(Wirasenjaya 2014)

Peran advokasi yang dilakukan NGO selanjutnya dilakukan melalui:

1. Peran Diskursif atau *Mainstreaming* yaitu NGO memiliki peran untuk membuat suatu isu menjadi isu sentral. NGO melakukan *research* atau mengumpulkan informasi politik sebagai dasar dalam mensosialisasikan atau menyampaikan suatu isu kepada masyarakat, dimana informasi tersebut disampaikan dalam bahasa yang lebih dimengerti masyarakat dengan menerjemahkannya kedalam simbol-simbol yang lebih menarik dan mudah dipahami.
2. Peran Kontrol yaitu NGO memiliki peran sebagai alat kontrol atas kebijakan dan regulasi yang dibuat oleh pemerintah, dengan menghimpun dukungan dari komunitas lokal, tokoh masyarakat dan artis nasional maupun internasional untuk menghimpun dukungan secara politik, karena NGO bukanlah lembaga politik ataupun militer yang memiliki *power*.
3. Peran Regulatif yaitu NGO memiliki peran dalam mempengaruhi proses pembuatan kebijakan dan regulasi yang dibuat oleh pemerintah, dengan menyampaikan rekomendasi dan pemikirannya.¹

Setelah semua proses tersebut dilakukan, NGO akan memonitor dan memastikan bahwa pemerintah atau pihak yang memiliki pengaruh besar melaksanakan perubahan atas suatu isu yang telah diadvokasi, dengan memberikan laporan

¹ *Ibid.*, slide 6.

secara berkala sejauh mana pencapaian dari advokasi yang telah dilakukan. (Wirasenjaya 2014)

Ketika berbicara mengenai NGO tidak lepas kaitannya dengan advokasi. Advokasi adalah sebuah upaya untuk memperbaiki atau merubah kebijakan publik agar sesuai dengan kehendak atau kepentingan mereka yang mendesak terjadinya perubahan tersebut. Kata advokasi berasal dari bahasa Inggris *to advocate* yang dapat berarti membela (pembelaan kasus di pengadilan-*to defend*), memajukan atau mengemukakan (*to promote*), berusaha menciptakan yang baru yang belum pernah ada (*to create*) atau dapat pula berarti melakukan perubahan secara terorganisir dan sistematis (*to change*). Jadi, tujuan utama advokasi adalah terjadinya perubahan kebijakan publik. (Azizah 2013)

Advokasi adalah sebuah proses yang didalamnya terdapat sejumlah aktivitas yang ditujukan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan. Advokasi bukanlah proses evolusi, advokasi didasarkan pada asumsi bahwa perubahan sistem dan struktur kemasyarakatan yang lebih luas dapat dilakukan melalui perubahan-perubahan kebijakan publik secara bertahap (*gradual and incremental change*). (Azizah 2013)

Peran Greenpeace Filipina dalam Revolusi Energi Filipina

Greenpeace Filipina secara aktif melakukan kampanye yang bertajuk *Climate justice*, dengan menggandeng masyarakat lokal, tokoh masyarakat bahkan artis internasional untuk peduli terhadap perubahan iklim dan mempromosikan energi terbarukan. Karena perubahan iklim ini bukan hanya masalah lingkungan tapi juga persoalan kemanusiaan. Berbagai kampanye baik secara online dan offline aktif Greenpeace Filipina lakukan dalam mempromosikan penggunaan energi terbarukan. Melalui website, facebook, twitter dan berbagi akun sosial yang dimiliki Greenpeace Filipina selalu memberikan informasi dan perkembangan yang dilakukan bersama masyarakat dan komunitas dalam kampanye energinya. Selain itu beberapa kampanye offline juga di selenggarakan, dimana melibatkan langsung masyarakat Filipina. Greenpeace Filipina

menggunakan *Solar Panel* dan *Wind Turbine* sebagai simbol yang digunakan Greenpeace dalam kampanye energinya, sebagai representasi dari energi bersih yang ramah lingkungan.

Revolusi Energi masuk dalam Kampanye Greenpeace mengenai perubahan iklim, dan Revolusi Energi merupakan solusi yang tepat untuk menyelamatkan Filipina dari dampak buruk perubahan iklim. Berikut kampanye yang dilakukan Greenpeace dalam mengupayakan Revolusi Energi di Filipina (Greenpeace Filipina):

1. Greenpeace Filipina bersama *Philippine Climate Change Commission*, *National Youth Commission*, *Philippine Rural and Reconstruction Movement*, *Philippine Movement for Climate Justice*, Aksyon Klima, Sanlakas, Dakila dan komunitas lokal lainnya mengadakan kampanye yang bertajuk *Climate Walk: A People's Walk for Climate Justice* di 24 Oktober 2014. Aksi tersebut dilakukan dengan berjalan sejauh 875 km, yang dimulai dari Manila hingga kota Tacloban. *Climate Walk* adalah aksi untuk memperingati setahun setelah bencana topan Haiyan dan membuka kesadaran masyarakat atas perubahan iklim.
2. Greenpeace Filipina melakukan aksi solidaritas kepada korban topan Hagupit di Taft, Eastern Samar. Staff dan relawan membawa 40 panel matahari untuk membantu menyediakan listrik bagi para korban bencana. Dimana dengan adanya aksi ini, Greenpeace telah memperkenalkan bahwa energi terbarukan itu mudah untuk diakses siapapun juga.
3. Pemutaran film dokumentasi mengenai iklim yang berjudul *Green Carpet* pada September 2015, acara ini dibuat Greenpeace Filipina bersama dengan DAKILA, Ako Bicol, Aksyon Klima, *Philippine Alliance of Human Rights Advocates* (PAHRA), dan *Philippines Rural Reconstruction Movement* (PRRM) dalam rangka mengantisipasi *Climate Talks* yang akan diadakan di Paris pada Desember 2015.
4. Greenpeace Filipina bekerjasama dengan komunitas lokal meluncurkan *Climate Justice March*, untuk menyuarakan perjanjian iklim global yang kuat dan adil pada *Climate Talks* yang akan diadakan di Paris pada akhir

tahun 2015. Aksi ini akan diselenggarakan selama akhir november mulai dari tanggal 23 sampai 30, yang melibatkan seluruh masyarakat lokal dan masyarakat internasional.

5. *Pedal Power for Clean Power*

Greenpeace dan komunitas lokal mengadakan kampanye ini untuk mempromosikan energi bersih, aksi ini dilakukan Greenpeace di Toril Distric Hall.

Selain aktif berkampanye secara langsung Greenpeace juga memberikan Rekomendasi kepada pemerintah Filipina sebagai solusi dalam upaya mengaplikasikan Revolusi Energi agar menjadi maksimal (The True of Cost Volume 2 2014):

1. *No new coal*

Dengan segera menentukan sebuah larangan lengkap dalam perencanaan pembangunan 45 pabrik batu bara yang baru, dan melarang apapun tindakan yang berkaitan dengan pengadaan pabrik batu bara.

2. *Old coal must go*

Membuat sebuah rencana untuk memberhentikan operasi 13 pabrik batu bara yang telah ada, dengan sebuah jadwal pengunduran diri yang jelas.

3. *Go green*

Mempercepat proyek energi terbarukan dan menghilangkan halangan untuk membuat energi terbarukan sebagai masalah yang mendesak.

4. *Coordinate better*

Memastikan koordinat yang lebih besar dengan wewenang dan kebijakan yang saling berhubungan dalam upaya untuk keluar dari batu bara dan kemudian menggunakan energi terbarukan, mempromosikan, efisien energi dan mengurangi dampak dari perubahan iklim.

5. *Lead globally*

Merangkul pembuat kebijakan internasional untuk membuat perjanjian mengenai iklim menjadi adil, berambisi, dan legal dalam level yang paling tinggi.

6. *Empower communities*

Mengembangkan rencana berkelanjutan untuk ketahanan iklim dengan membangun desentralisasi, yaitu sistem energi terbarukan berbasis masyarakat yang terhubung ke jaringan yang lebih kecil.

Tidak hanya mengedukasi dan melakukan kampanye yang melibatkan berbagai golongan, Greenpeace Filipina aktif melakukan advokasi untuk revolusi energi, karena tujuan dari setiap kampanye Greenpeace adalah melegalkannya menjadi peraturan perundangan sehingga hukumnya lebih kuat. Berikut beberapa keberhasilan yang telah Greenpeace Filipina lakukan dalam upaya mengontrol perundang undangan pemerintah dengan memberikan rekomendasi perundang undangan yang mendukung keadilan iklim dan keselamatan lingkungan (Greenpeace Asia Tenggara 2010):

1. 1999: Greenpeace sukses memimpin kampanye untuk mendorong pasal dari UU Republik No.8749, yang dikenal sebagai UU Udara Bersih 1999 Filipina.
2. 2001: Bersama dengan organisasi lingkungan dan masyarakat, Greenpeace berhasil mendorong disetujuinya undang-undang manajemen ekologi pembuangan limbah Filipina yang memandatkan penerapan strategi dari awal hingga akhir, penguraian sampah yang sesuai, pemisahan daur ulang sampah untuk masalah sampah di Filipina.
3. 2002: Greenpeace dapat mencegah pembangunan PLTU di Pulpandan, Provinsi Negros, Filipina melalui kampanye mempromosikan solusi dari dampak perubahan iklim.
4. 2006: Greenpeace dan masyarakat Isabela berhasil membuat Perusahaan Minyak Bumi Nasional Filipina (PNOC) untuk membatalkan rencananya mengintegrasikan penambangan batu bara di Isabela, Filipina.
5. 2006: Kelompok anak-anak muda di Greenpeace (*Solar Generation*) akhirnya berhasil membuat *Asian Development Bank* (ADB) mengalirkan pendanaan untuk Proyek Energi Bersih sebesar 1 milyar dollar di tahun

2008. Seruan ini dilakukan *Solar Generation* selama pertemuan *Asian Development Bank* yang ke-39.
6. 2007: Greenpeace bekerjasama dengan GRIPP (*Green Renewable Independent Power Production*) meluncurkan Jeepney (kendaraan umum iconic Filipina) dengan menggunakan energi terbarukan. *The electronic Jeepney* adalah inovasi untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil untuk mengatasi perubahan iklim.
 7. 2008: Senator Filipina akhirnya meluluskan pendanaan untuk energi terbarukan, dan undang-undang energi terbarukan, untuk menjaga keamanan energi dan memerangi perubahan iklim.

Kesimpulan

Greenpeace adalah salah satu NGO Internasional yang aktif dalam isu lingkungan. Perubahan iklim adalah bencana yang harus ditanggapi secara serius, dan Greenpeace termasuk salah satu pihak yang berupaya untuk keadilan iklim dan menjaga keamanan lingkungan. Revolusi Energi diperkenalkan oleh Greenpeace sebagai solusi untuk energi yang lebih bersih dan menghentikan perubahan iklim. Karena masih tingginya ketergantungan negara dunia akan energi fosil terutama batu bara yang menjadi ancaman bagi iklim dunia.

Sebagai organisasi kampanye, Greenpeace Filipina melakukan aksi nyata, dengan mengajak berbagai pihak agar mau lebih peduli dan menambah pengetahuannya akan lingkungan. Mengumpulkan dukungan agar terealisasinya hukum yang adil dan tegas mengenai energi, sehingga Revolusi Energi akan teraplikasi secara maksimal untuk kehidupan yang lebih baik tanpa merusak lingkungan.

Referensi

Almendras, Jose Rene D. "Toward a Sustainable and Competitive Power Sector." 26 April 2014. http://www.mbc.com.ph/engine/wp-content/uploads/2012/03/2012-04-26_JRDAImendras-Towards_a_Sustainable_and_Competitive_Power_Sector-part-1.pdf (diakses November 17, 2015).

- Azizah, N. (2013). *Advokasi Kuota Perempuan di Indonesia*. Yogyakarta: LP3M UMY & Jurusan Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Birol, Dr.Fatih. *Southeast Asia Energy Outlook: World Energy Outlook Special Report*. France: International Energy Agency, 2010.
- Burchill, Scott, et al. *Theories of International Relations*. PALGRAVE MACMILLAN, 2005.
- Departemen of Energy. "Philippine Energy Situationer." *Departemen of Energy*. https://www.DpartemenEnergi.gov.ph/DepartemenEnergi_files/pdf/01_Energy_Situationer/PhilippineEnergySituationer.pdf (diakses November 17, 2015).
- D.Lasco, Rodel, dan Florencia B.Pulhin. *Philippine Forest Ecosystem and Climate Change: Carbon Stocks, Rate of Sequestration and the Kyoto Protocol*. Annals of Tropical Research, 2003.
- Fahrizal, S. "Pengertian Peran Menurut Para Ahli." <http://www.digilib.unila.ac.id> (diakses October 21, 2015).
- Gonzales, Iris. "Renewable Energy in the Philippines." *Asia Climate Journal*, 2015.
- Greenpeace Asia. *Briefing Paper: Coal Not Cheap, Not Clean*. Greenpeace Asia, 2010.
- Greenpeace Asia Tenggara. *Briefing Paper: Energy Revolution*. Greenpeace Asia Tenggara.
- Greenpeace Asia Tenggara. *Greenpeace Southeast Asia. 10 years of protecting our environment together*. Greenpeace Asia Tenggara, 2010.
- Greenpeace Asia Tenggara. *Greenpeace Southeast Asia: Climate and Energy Campaign*. Greenpeace Asia Tenggara, 2010.
- Greenpeace Asia Tenggara. *Greenpeace Southeast Asia: Our Achievements*. Greenpeace Asia Tenggara, 2010.
- Greenpeace Asia Tenggara. *Laporan Tahunan 2013 Greenpeace Asia Tenggara*. Greenpeace, 2013.
- Greenpeace Asia Tenggara. *Laporan Tahunan Greenpeace Asia Tenggara 2012 : Orang Biasa yang Melakukan Hal-Hal Luar Biasa*. Greenpeace Asia Tenggara, 2012.
- Greenpeace Filipina. *Green is Gold: How Renewable Energy can save us money and generate jobs*. Filipina: Greenpeace, 2013.
- Greenpeace Filipina. *March For Climate Justice: Our Demands*. Manila: Greenpeace Filipina, 2015.
- Greenpeace Filipina. *Philippine Energy [R]evolution Roadmap to 2020*. Filipina: Greenpeace, 2011.

- Greenpeace Filipina. *The True Cost of Coal in the Philippines Volume 1*. Filipina: Greenpeace , 2014.
- Greenpeace Philippines. *About Greenpeace*. <http://www.greenpeace.or.ph> (diakses October 2015).
- Greenpeace Philippine. *The True Cost of Coal Volume 2: Cost of Climate Change In The Philippines*. Filipina: Greenpeace , 2014.
- Jabines, A., & Inventor, J. (2007). Climate Change Impacts and The Philipines. *The Philippine:A Climate Hotspot* , 4.
- Keck, M. E., & Sikkink, K. (1998). *Activist Beyond Border*. Itacha: Cornell University Press.
- Kimura, Masataka. *The Emergence of The Middle Classes and Political Change in the Philippines*. 2003.
- Mao Yushi, S. H. (2008). *The True Cost of Coal 1*. Greenpeace.
- Mark Dia, Albert Lozada, Amalie Conchell H. Obusan. "The Philippines Energy Revolution Roadmap to 2020." *Greenpeace Phiippines*. June 2011. (diakses Oktober 2015).
- Miththapala, S. (2008). *International Union for Consevation of Nature and Natural Resources*. Dipetik 10 10, 2015, dari Pengintegrasian Perlindungan dalam Pengelolaan Bencana: <http://smsdataiucn.org>
- M.Jose, Aida, dan Nathaniel A.Cruz. "Climate Change Impacts and Responses in the Philippines: Water Resources." *Climate Research*, 1999: 77-84.
- More, Charles. *Understanding The Industrial Revolution*. London: Routledge, 2000.
- National Renewable Energy Board. *Renewable Portfolio Standart*. Philippines: Department of Energy, 2011.
- Panduan Akademik Program Studi Ilmu Hubungan Internasional*. Yogyakarta: FISIPOL UMY, 2014.
- Sikkink, M. E. (1999). Transnational Advocacy Networks in International and Regional Politics. 89-101.
- Taskel, Sven. *Enegy [R]evolution: A Sustainable ASEAN Energy Outlook*. Greenpeace International dan EREC, 2013.
- Wirasenjaya, Adde M. *NGO sebagai Aktor Baru dalam Politik Global*. Yogyakarta.2014.
- _____*definisi lingkungan hidup*. <http://kamusbahasaIndonesia.org> (diakses Mei 04,2015).
- _____*International Convention for The Protection of All Persons from Enforced Disappearance*.<http://ohcr.org/EN/HRBodies/CED/Pages/ConventionCE.aspx> (diakses 5 10, 2015).